

DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya Dokumen Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan berdasarkan peraturan tersebut, Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Renstra Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik 2025.

Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tembilahan, Juli 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dr. TRIO BENI PUTRA, SE, MM
NIP.19751126 199802 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	42
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	44
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	67
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	69
3.3 Program dan Kegiatan	70
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	95
BAB V PENUTUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah. Maka keberadaan Undang-undang tersebut sebagai salah satu produk hukum menjadi alat penting dan strategis dalam merespon berbagai tuntutan perubahan kearah pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan Rencana Pembangunan Tahunan

bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Adapun penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selanjutnya Renja ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan pada tahap berikutnya RKA tersebut akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan – peraturan tersebut, serta untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance), serta lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas maupun fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021, dibentuklah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam mengimplementasikan kinerjanya yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas Kinerja, maka disini dapat disajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur

penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Selaras dengan ketentuan tersebut, sistem pembangunan yang demikian diharapkan akan dapat menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir secara berkeadilan, efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
26. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
27. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
28. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Persandian
29. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005- 2025;

31. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.
32. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja-PD) adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif tahunan Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penentuan dan pelaksanaan kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah guna mencapai dan mewujudkan arah kebijakan umum pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- untuk memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan tahunan Perangkat Daerah;
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Perangkat Daerah;
- Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah; dan
- Sebagai instrument untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir disusun secara sistematis yang berisikan antara lain :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun n-2/2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra-PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel terlampir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

(NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan tata cara menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas pokok, fungsi, norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK),

Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
4. Lampirkan Tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSPK dan SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir,

- Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidan pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi referensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kabijakan Perencanaan Pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berkaitan dengan Evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 yang merupakan Renja Tahun terakhir dalam periode Renstra 2018-2023, maka berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengisian Tabel II.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2024) mencantumkan program dan kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2024 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.016.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.016.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	195	95,85	100	71	71	100	266,85	1,4
2.16.01.2.01	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	180	100	90	90	100	100	290	1,6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.01.2.01.01		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	6	6	0,0	
2.16.01.2.01.06		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	14	7	7	100	4	18	1,3	
2.16.01.2.01.07		1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	2	0,0	
2.16.01.2.02	2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar	200	98	100	98	98	100	296	1,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.02.01		2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	29	30	29	97	30	88	1,5
2.16.01.2.02.02		2.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	1	0,0
2.16.01.2.02.05		2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	1	1	100	1	3	1,5
2.16.01.2.03		3.1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang Terpelihara	200	100	100	33	33	100	233	1,2
2.16.01.2.03.02		3.1.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	3	3	1	33	1	5	1,3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.05	4.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	200	50	100	88	88	100	238	1,2
2.16.01.2.05.02		4.1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	60	0	30	30	100	25	55	0,9
2.16.01.2.05.09		4.1.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	5	2	4	3	75	3	8	1,6
2.16.01.2.06	5.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran Dalam Kondisi Baik	200	91	100	78	78	100	269	1,3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.06.01		5.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	3	3	1	33	1	5	1,3
2.16.01.2.06.02		5.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	51	62	8	2	25	2	66	1,3
2.16.01.2.06.03		5.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	0	1	1	0,0
2.16.01.2.06.04		5.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	4	2	4	100	2	10	1,7
2.16.01.2.06.05		5.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	7	6	2	1	50	1	8	1,1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.01.2.06.06		5.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	500	342	250	150	60	250	742	1,5
2.16.01.2.06.09		5.1.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	148	90	75	75	100	75	240	1,6
2.16.01.2.07	6.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	200	0	0	0	0	100	100	0,5
2.16.01.2.07.01		6.1.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	0	2	2	0,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.01.2.07.02		6.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	0	0	0	0	1	1	0,3
2.16.01.2.07.09		6.1.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	0	0	0	0	1	1	0,5
2.16.01.2.08	7.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)	200	83	100	38	38	100	221	1,1
2.16.01.2.08.01		7.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	21	20	20	1	5	1	22	1,0
2.16.01.2.08.02		7.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	8	2	4	4	100	2	8	1,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.01.2.08.04		7.1.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	91	12	12	1	8,3	1	14	0,2
2.16.01.2.09	8.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	200	100	100	59	59	100	259	1,3
2.16.01.2.09.01		8.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	0	2	2	0,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.01.2.09.02			8.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	6	3	4	3	75	3	9	1,5
2.16.01.2.09.09			8.1.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	0	2	2	100	1	3	1,0
2.16.01.2.09.11			8.1.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	103	100	100	3	3	3	106	1,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02	2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi (Dengan Satuan:Persen)	181,48	62	100	89	89	100	251	1,4
2.16.02.2.01	2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan (Dengan Satuan:Persen)	200	95	100	89	89	100	284	1,4
2.16.02.2.01.01		2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	197	197	0,0
2.16.02.2.01.02		2.1.2 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	20	20	0,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01.04		2.1.3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	40	45	20	15	75	8	68	1,7
2.16.02.2.01.05		2.1.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	150	83	80	80	100	75	238	1,6
2.16.02.2.01.06		2.1.5	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	47	20	20	35	100	1	56	1,2
2.16.02.2.01.08		2.1.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	1	0,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01.10		2.1.7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	0	10	10	0,0
2.16.02.2.01.12		2.1.8	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dengan Satuan:Dokumen)	10	4	5	4	80	2	10	1,0
2.16.02.2.01.13		2.1.9	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	0	5	5	0,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.03	3	Program Aplikasi Informatika		Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. Inhil (Dengan Satuan:Persen)	58,82	90	100	87	87	74	251	4,3
				Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK (Dengan Satuan:Persen)	66,48	90	100	100				
2.16.03.2.01		3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang dikelola (Dengan Satuan:Persen)	190	90	90	78	86,67	100	268	1,4
2.16.03.2.01.01		3.1.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Domain)	35	30	14	14	100	3	47	1,3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.03.2.01.02		3.1.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	17	30	7	7	100	3	40	2,4
2.16.03.2.01.03		3.1.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Unit)	10	0	5	3	60	17	20	2,0
2.16.03.2.02		3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi (Dengan Satuan:Persen)	180	90	100	100	100	90	280	1,6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.03.2.02.01			3.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	10	1	1	1	100	1	3	0,3
2.16.03.2.02.02			3.2.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	1	0,0
2.16.03.2.02.03			3.2.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Dengan Satuan:Unit)	11	2	2	3	150	2	7	0,6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.03.2.02.04		3.2.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	1	0,0
2.16.03.2.02.07		3.2.5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Dengan Satuan:Unit)	6	2	4	4	100	2	8	1,3
2.16.03.2.02.08		3.2.6	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Layanan)	4	0	3	3	100	2	5	1,3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.03.2.02.09			3.2.7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (Dengan Satuan:Dokumen	0	0	0	0	0	5	5	0,0
2.16.03.2.02.10			3.2.8	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	345	1	1	1	100	1	3	0,0
2.16.03.2.02.11			3.2.9	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	2	2	0,0
2.16.03.2.02.12			3.2.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dengan Satuan:Dokumen)	281	2	2	2	100	1	5	0,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2.020.02	4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	159,7	100	100	100	100	100	300	1,9
2.20.02.2.01	4,1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia (Dengan Satuan:Persen)	200	100	100	100	100	100	300	1,5
2.20.02.2.01.01		4.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dengan Satuan:Dokumen)	36	55	35	35	100	1	91	2,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.20.02.2.01.02		4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	0	5	5	0,0
2.20.02.2.01.03		4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	25	25	0,0
2.20.02.2.01.05		4.1.4	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	0	1	1	0,0
2.021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2.021.02	5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persen)	153	30	100	100	100	37	167	1,1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.21.02.2.01	5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian (Dengan Satuan:Persen)	200	30	100	100	100	100	230	1,2
2.21.02.2.01.01		5.1.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	1	0,0
2.21.02.2.01.02		5.1.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	0	1	1	0,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
						Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.21.02.2.01.03		5.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	3	2	2	2	100	1	5	1,7
2.21.02.2.01.04		5.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	0	0	0	0	5	5	0,0
2.21.02.2.01		5.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perangkat pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	0	0	100	100	0,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra-PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.21.02.2.01.01			5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	0	0	0	0	1	1	0,0

Berdasarkan Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja diatas bahwa capaian program dan kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang Direncanakan, yaitu:
 - a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - b. Program Aplikasi Informatika
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- c. Program Aplikasi Informatika
- 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
 - a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

- b. Program Aplikasi Informatika
 - 2) Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, yaitu:
 - Koordinasi yang kurang baik dan maksimal dalam permintaan data
 - Kurangnya staf ASN, terbatasnya SDM IT
 - Terbatasnya operasional pendukung kinerja kegiatan
 - Karena tidak adanya Perubahan tahun anggaran 2023 maka rencana perubahan tidak di sahkan dan satuan target yang ingin di rubah tidak bisa digunakan sehingga tidak mencapai target RKPD/rencana murni. Akan tetapi Realisasi target telah sesuai dengan target DPA TA 2023.
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD antara lain:
 - Adanya program/kegiatan yang tidak mencapai target yang direncanakan karna ketidaksesuaian target kinerja
 - Kurang maksimalnya data dalam pencapaian program Renstra PD
 - Terbatasnya kinerja OPD dalam memecahkan permasalahan
 - Pekerjaan jadi kurang efektif karna operasional pendukung kinerja kegiatan terbatas
- 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:
 - Membuat regulasi / SOP setiap tahunnya
 - Membuat Perencanaan kerja yang baik salah satunya dengan merencanakan dan memperhitungkan target kinerja dengan optimal
 - Mempercepat pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu-isu strategis di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian.
 - Mempercepat proses pengajuan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- Mengoptimalkan peran kontrol internal agar lebih reaktif dan proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi terkait maupun *stakeholders* dalam mensinkronkan dan menyelaraskan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
- melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui
- Terpenuhinya SDM IT
- Terpenuhinya operasional penunjang kinerja kegiatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya bergabung pada Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sejak tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2016 Akhir berdiri sendiri berdasarkan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Lampiran XV menjadi OPD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Komunikasi dan informatika Persandian dan Statistik yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan OPD, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil

saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja OPD kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*), karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024-2026, maka secara rinci indikator kinerja dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks SPBE (INDIKATOR TUJUAN)			2,09	3,0	2,30	2,50	3,00	2,13	2,23	2,30	2,50	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (INDIKATOR SASARAN)			-	-	100	100	100	-	-	100	100	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (INDIKATOR SASARAN)			-	-	50	75	100	-	-	50	75	
4	Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi (INDIKATOR SASARAN)			-	-	100	100	100	-	-	100	100	
5	Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah (INDIKATOR SASARAN)			-	-	37	74	100	-	-	37	74	
6	Nilai Evaluasi RB Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Inhil atas Komponen Pengungkit (INDIKATOR			23	24	20	20,5	21	19,39	-	20	20,5	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	TUJUAN)												
7	Nilai AKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Inhil (INDIKATOR SASARAN)			65	70	BB	BB	BB	B	n/a	BB	BB	
8	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		√	-	-	3	3	3	3	3	3	3	
9	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		√	-	-	27	41	54	3	36	41	54	
10	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab. Inhil		√	-	-	623.33 0	685.66 3	685.66 3	515.14 9	521.67 8	623.33 0	685.66 3	
11	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		√	-	-	0	34	34	0	34	0	34	
12	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		√	-	-	34	34	34	34	34	34	34	
12	Tingkat keamanan informasi pemerintah		√	-	-	238	477	645	-	-	238	477	

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja di ambil dari Bab IV Tujuan/Sasaran dan Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Dokumen Renstra Tahun 2024 s/d 2026 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang mana ada Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kunci PD (IKK) . Pergantian pada Renstra 2018-2023 menjadi Renstra 2024-2026 dan adanya perubahan pada Indikator Tujuan/Sasaran menyebabkan target dan

realisasi tercatat 0 di tahun 2022 dan 2023 dan akan dimulai pada Tahun 2024.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan ke depan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024-2026, permasalahan dan isu strategis difokuskan kepada kondisi terkini dan kondisi masa yang akan datang. Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil analisis permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting.

Berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan sampai perumusan program prioritas. Identifikasi permasalahan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan RPD Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026 sebagai berikut:

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) serta kelompok tenaga IT yang tersedia baik di kabupaten maupun kecamatan 2. Sebagian besar penduduk indragiri hilir belum dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi 3. Masyarakat dan perangkat daerah di kabupaten indragiri hilir belum sepenuhnya memahami dengan maksimal era keterbukaan informasi public 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya infrastruktur dan layanan aplikasi bidang komunikasi dan informasi hingga ke kecamatan dan desa 2. Masih kurangnya sumber daya yang handal dan professional 3. Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE 4. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi. 5. Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI. 6. Belum optimalnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah. 7. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang keterbukaan informasi.
2	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sinergi antara instansi pemerintah dalam menyampaikan data di Inhil Satu Data Merdeka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya aparatur yang handal dan profesional dalam Bidang Statistik 2. Kurangnya Pemahaman OPD terhadap pentingnya Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan
3	Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian 2. Pemutakhiran jaringan dan sistem pengamanan sandi belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi (sandiman) akibatnya regenerasi SDM Sandiman kurang berjalan dengan baik dan minat menjadi SDM sandi yang kurang. 2. Terbatasnya kemampuan pemda dalam menetapkan informasi berklasifikasi (pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan).

Berikut disampaikan isu strategis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

- Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota Smart City

Penerapan SPBE dapat mendukung Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan Smart City. penerapan SPBE dapat menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif untuk menerapkan konsep Smart City dalam membangun kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Selain itu, konsep Smart City juga menempatkan data dan teknologi sebagai inti dari pengambilan keputusan dan manajemen kota. Oleh karena itu, penerapan SPBE yang memanfaatkan teknologi untuk untuk mengumpulkan dan menganalisis data bangunan dan lingkungan hidup sangat sesuai dengan konsep Smart City.

- Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Terintegrasi

Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital berkembang sangat pesat. Penggunaan komputer dan handphone tidak hanya sebatas untuk bekerja dan berkomunikasi saja, namun digunakan dengan berbagai manfaat lainnya. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud.

- Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang Berbasis Data

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 274, 391 dan 394, bahwa

perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan secara teknis diatur di dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah menyatakan bahwa SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

- **Pelaksanaan dan Penerapan Sistem SPBE**

Pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

- **Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level birokrasi. Pemerintah dan badan publik wajib menyediakan layanan informasi publik bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap

pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Terdapat batasan dalam keterbukaan informasi, seperti informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat dapat menghambat proses penegakan hukum. Keterbukaan informasi publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur lebih lanjut tentang keterbukaan informasi.

- *Information Technology for Society*

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan Teknologi informasi telah membawa pengaruh besar, teknologi memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, teknologi dapat dimanfaatkan ke dalam berbagai bidang, yakni Pemanfaatan teknologi dalam bidang ekonomi, bidang pangan, bidang komunikasi dan informasi, bidang transportasi, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Agar seluruh masyarakat bisa memanfaatkan teknologi sesuai dengan bidangnya. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan hal ini.

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi.
- 2) Menyediakan akses informasi yang memadai untuk seluruh masyarakat.
- 3) Membuat serta mengembangkan sistem yang bisa dijangkau dan digunakan masyarakat.
- 4) Mengembangkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan.
- 5) Melakukan perawatan secara berkala terhadap sarana prasarana teknologi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Namun, dikarenakan adanya Perubahan pada Klasifikasi dan kodifikasi sub kegiatan di dalam SIPD yang menyebabkan ketidaksesuaian antara SIPD dengan Renstra Tahun 2024 s.d 2026, maka Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir melakukan Penyesuaian Sub Kegiatan (Mapping Sub Kegiatan) yang disertai Dengan Berita Acara Hasil Pemetaan Sub Kegiatan RPD 2025 – 2026 hari Rabu tanggal lima belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMETAAN SUB KEGIATAN RPD 2025-2026

OPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

NO.	RPD 2024-2026 (KEGIATAN)				KEPMENDAGRI NO.050-5889 TAHUN 2021 (SUB KEGIATAN RENSTRA 2024-2026)		HASIL MAPPING SUB KEGIATAN TAHUN 2025-2026	
	Kode	Program	Kode	Kegiatan	SEMULA		MENJADI	
					Kode	Sub Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan
1	2.16.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-
					2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-
					2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten
					2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
					2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik
					2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	-	-
					2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
					2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
					2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	-	-
					2	2.16.03	Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.16.03.2.01
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa					
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-				-
		2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.0018				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				2.16.03.2.02.0022				Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah
		2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2.16.03.2.02.0013				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
				2.16.03.2.02.0017				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
		2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.0030				Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	2.16.03.2.02.0014				Koordinasi penyusunan proses bisnis
		2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.16.03.2.02.0021				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0023				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.0016				Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda					
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					
3	2.20.02	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
					2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
					2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data
					2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	-	-

Setelah dilakukan Mapping Sub Kegiatan, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menyusun anggaran sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan pagu indikatif yang diberikan oleh Bappeda baik Pagu Murni dan Pagu Prioritas Kegiatan dengan pagu sebesar **Rp.14.616.793.913,-** dengan rincian rencana kerja pada SIPD sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Kabupaten Indragiri Hilir

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	7.031.447.592,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	7.031.447.592,00	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	86.302.020,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	86.302.020,00	
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3 Dokumen	69.810.820,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3 Dokumen	69.810.820,00	
b)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4 Laporan	11.028.070,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4 Laporan	11.028.070,00	
c)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2 Laporan	5.463.130,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2 Laporan	5.463.130,00	
2.	Administrasi Keuangan	Tembilahan	Persentase pelaporan keuangan dan aset yang	100 Persen	3.770.594.593,00	Administrasi Keuangan	Tembilahan	Persentase pelaporan keuangan dan aset yang	100	3.770.594.593,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Person			Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Person	Persen		
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	30 Orang/bulan	3.762.594.593,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	30 Orang/bulan	3.762.594.593,00	
b)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	-	
c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	8.000.000,00	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase aset dan barang milik daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara (Dengan Satuan:Person)	100 Persen	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase aset dan barang milik daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara (Dengan Satuan:Person)	100 Persen	-	
a)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	-	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi dan aparatur yang berkinerja baik	100 Persen	13.900.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi dan aparatur yang	100 Persen	13.900.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			(Dengan Satuan:Person)					berkinerja baik (Dengan Satuan:Person)			
a)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1 Paket	-	
b)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	2 Orang	13.900.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	2 Orang	13.900.000,00	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Person)	1000 Person	1.153.842.339,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Person)	1000 Person	1.153.842.339,00	
a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1 Paket	4.999.965,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1 Paket	4.999.965,00	
b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2 Paket	295.842.534,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2 Paket	295.842.534,00	
c)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1 Paket	4.979.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1 Paket	4.979.500,00	
d)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan	2 Paket	52.500.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan	2 Paket	52.500.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Hilir	Satuan:Paket)				Hilir	Satuan:Paket)			
e)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2 Paket	13.489.340,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2 Paket	13.489.340,00	
f)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	250 Dokumen	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	250 Dokumen	5.000.000,00	
g)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12 Laporan	777.031.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12 Laporan	777.031.000,00	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	-	
a)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1 Unit	-	
b)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1 Unit	-	
c)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1 Unit	-	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Hilir					Hilir				
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	1.676.058.640,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	1.676.058.640,00	
a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	2.500.000,00	
b)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	240.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	240.000.000,00	
c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	1.433.558.640,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	1.433.558.640,00	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	330.750.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	330.750.000,00	
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	3 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	3 Unit	-	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3 Unit	42.560.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3 Unit	42.560.000,00	
c)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	6 Unit	269.180.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	6 Unit	269.180.000,00	
d)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	29 Unit	19.010.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	29 Unit	19.010.000,00	
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	6.748.839.321,00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	6.748.839.321,00	
I	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	6.748.839.321,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	6.748.839.321,00	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	7 Komunitas	-	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	7 Komunitas	-	
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai	40 Permohonan	179.839.321,00	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai	40 Permohonan	179.839.321,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Tembilahan Kota	peraturan perundangan				Tembilahan Kota	peraturan perundangan			
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	70 Media	6.519.000.000,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	70 Media	6.519.000.000,00	
	Penyusunan Konten	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Konten Informasi Publik	3 Konten	50.000.000,00	Penyusunan Konten	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Konten Informasi Publik	3 Konten	50.000.000,00	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	6 Orang	-	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	6 Orang	-	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. Inhil (Dengan Satuan:Persen)	92	508.423.000,00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. Inhil (Dengan Satuan:Persen)	92	508.423.000,00	
		Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK (Dengan Satuan:Persen)	75			Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK (Dengan Satuan:Persen)	75		
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan jumlah sub domain lingkup pemma yang dikelola	100 Persen	-	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan jumlah sub domain lingkup pemma yang dikelola	100 Persen	-	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	-	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	-	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	90 Persen	508.423.000,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	90 Persen	508.423.000,00	
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	-	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	-	
	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen	23.620.000,00	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen	23.620.000,00	
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	-	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	-	
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	17.235.000,00	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	17.235.000,00	
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	24.000.000,00	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	24.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	-	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	-	
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	73.990.000,00	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	73.990.000,00	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	17.120.000,00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	17.120.000,00	
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	-	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	32 Unit	81.496.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	32 Unit	81.496.000,00	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	78.842.000,00	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota	34 Perangkat	78.842.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kab/Kota	Hilir	yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			Kab/Kota	Hilir	yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Daerah		
	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	-	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	-	
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	192.120.000,00	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	192.120.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	218.542.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	218.542.000,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase data statistik sektoral yang tersedia (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	218.542.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase data statistik sektoral yang tersedia (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	218.542.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	61.676.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	61.676.000,00	
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring,	100 Persentase	70.736.000,00	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring,	100 Persentase	70.736.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan					dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan			
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	-	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	-	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	86.130.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	86.130.000,00	
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	-	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persen)	74 Persen	109.542.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persen)	74 Persen	109.542.000,00	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	109.542.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	109.542.000,00	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	-	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilanghan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	-	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Laporan)	6 Laporan	38.242.000,00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Laporan)	6 Laporan	38.242.000,00	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	68.620.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	68.620.000,00	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	15 Perangkat Daerah	2.680.000,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	15 Perangkat Daerah	2.680.000,00	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan perangkat pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi (Dengan Satuan: Persen)	100 Persen	-	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan perangkat pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi (Dengan Satuan: Persen)	100 Persen	-	
	Operasionalisasi Jaring	Tembilahan Kabupaten	Jumlah Perangkat Daerah	13 Perangkat	-	Operasionalisasi Jaring	Tembilahan Kabupaten	Jumlah Perangkat Daerah	13	-	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Indragiri Hilir	yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	Daerah		Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Indragiri Hilir	yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Hal ini berguna untuk menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan kepentingan terkait pelayanan OPD. Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Musrenbang 2024 tahun ini dilakukan secara langsung ke Kecamatan. Pada saat pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan ada beberapa usulan yang diberikan oleh kecamatan. Usulan tersebut disambut baik dan dianalisis kembali serta akan dipertimbangkan kelayakannya oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk dimasukkan kedalam anggaran tahun 2025. Pada saat perintah pelaksanaan penginputan Renja 2024 melalui Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mana terlebih dahulu dilakukan verifikasi usulan masyarakat yang diusulkan oleh perangkat desa atau kelurahan dan diverifikasi lewat akun Esselon IV OPD. Ketika dipantau setiap harinya lewat akun Esselon IV terdapat banyak usulan yang

diusulkan oleh Kecamatan/Desa. Akan tetapi semua usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan tupoksi dan wewenang Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dan semua Desa mengusulkan permintaan pembangunan tower (Desa Makmur Jaya Kateman, Desa Hibrida Jaya Teluk Belengkong, Desa Kuala Selat Kateman, Desa Benteng Barat Sungai Batang, Desa Seberang Pulau Kijang Reth, Desa Sri Damai Pulau Burung, Desa Sungai Iliran GAS, Desa Mekar Sari Reth, Desa Tanjung Pasir Tanah Merah). Maka dari itu, usulan tersebut tidak bisa diterima oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi akan diteruskan ke Kementrian untuk di usulkan dengan catatan Desa yang bersangkutan melengkapi persyaratan untuk pembangunan tower.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir
Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan melalui *Kick Off Meeting* Penyusunan RKP 2025 yang diselenggarakan secara daring bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memasukkan dua substansi utama, Pertama adalah bagaimana RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 atau Indonesia Emas 2045, dapat tercapai di dalam fondasi lima tahun pertama dari pembangunan yang disusun di dalam dokumen RPJMN 2025-2029. Substansi kedua ialah adanya penguatan visi-misi dan program Presiden terpilih pada tahun 2024 ke dalam RPJMN 2025-2029.

Tahapan penyusunan RPJMN 2025-2029 dimulai dari rancangan teknokratik, yakni penjaringan aspirasi masyarakat sepanjang Juni 2023-Januari 2024. Kedua ialah tahap rancangan RPJMN 2025-2029 selama Maret-Desember 2024 yang akan melakukan integrasi dengan visi, misi, dan program presiden terpilih dengan penajaman. Kemudian koordinasi dengan kementerian/lembaga, BUMN, dan daerah, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN. Terakhir, tahap penetapan RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) pada Januari 2025.

Adapun tahapan penyusunan RKP 2025 dimulai dari rancangan awal RKP dengan melakukan FKP selama bulan November 2023-April 2024, lalu tahap rancangan RKP 2025 pada bulan April-Mei 2024 untuk penyesuaian RKP berdasarkan pagu indikatif dan Musrenbangnas. Kemudian tahap penyesuaian RKP melalui Perpres berdasarkan pembicaraan pendahuluan DPR dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) selama bulan Mei-Juli 2024. Terakhir,

pemutakhiran RKP dengan Perpres melalui penyesuaian RKP berdasarkan Undang-Undang APBN pada bulan Oktober-Desember 2024.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 bertemakan “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diwujudkan melalui tiga arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah,dan;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

RKP 2025 ini diproyeksikan sebagai respon atas perubahan global sekaligus pemenuhan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Kemenkominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merilis Visi Indonesia Digital VID 2045 sebagai konsep, visi, dan arah strategi nasional dalam mendorong terwujudnya Indonesia Digital 2045 sebagai turunan langsung dari Visi Indonesia Emas 2045. Pencapaian VID 2045 dilakukan dengan prinsip pembangunan digital yang inklusif di mana ada pemerataan akses digital dan penyediaan ruang digital yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ada empat misi utama yang direncanakan dalam VID 2045. Pertama, percepatan transformasi digital sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas layanan publik, serta memperkuat

pertahanan dan keamanan nasional. Kedua, pengembangan dan penguatan ekosistem digital nasional di mana partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan meliputi pemerintah, bisnis dan industri, asosiasi, akademisi dan masyarakat sebagai operator dari ekosistem digital untuk mendukung penguatan ekosistem digital yang menyeluruh dan berkesinambungan. Ketiga, pembuatan regulasi adaptif dan akomodatif di mana kebijakan yang adaptif dan akomodatif terhadap berbagai perkembangan termasuk teknologi digital. Dan keempat, penguatan institusi sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, keagamaan, sebagai upaya masif untuk meningkatkan pemahaman digital untuk mengoptimalkan manfaat teknologi digital dan informasi yang berdampak negatif.

Langkah Strategis dalam mencapai VID 2045 ini terbagi dalam empat fase. **Fase pertama tahun 2025 s.d 2029 sebagai fase penguatan fondasi digital**, fase kedua tahun 2030 s.d 2034 sebagai fase pengembangan ekosistem digital yang berdaya saing. Fase ketiga, tahun 2034 s.d 2039 masuk dalam fase pengembangan inovasi yang berkelanjutan bertujuan untuk mendorong inovasi berkelanjutan dan capaian keunggulan teknologi dengan komitmen pada tujuan keberlanjutan lingkungan. Adapun fase keempat tahun 2039 s.d 2045 sebagai fase memimpin teknologi global yang berfokus pada mengejar posisi sebagai negara yang maju dengan penerapan teknologi global dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Tujuan dan Sasaran Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-		
				2024	2025	2026
Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	Indeks	2.30	2.50	3.00
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik Dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Persen	50	75	100
		Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100
		Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	37	74	100

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan di implementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap

akhir periode pelaksanaan. Untuk itu pada pembahasan bab 3.3 ini akan dijelaskan apa saja faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika ada rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD yakni sebagai berikut:

a. Faktor yang menjadi Pertimbangan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- Pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir
- Mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;

b. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 sesuai dengan Rancangan Rensta Tahun 2024-2026 berjumlah sebanyak 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 55 (lima puluh lima) Sub Kegiatan yang masing-masing kegiatan lokasinya ditujukan dan fokus terhadap Kota Tembilahan, Indragiri Hilir dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu sebesar Rp. 7.031.447.592,- dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 86.302.020,-
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.3.770.594.593,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.,-
 - Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.13.900.000,-
 - Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.1.153.842.339,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp.,-
 - Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp.1.676.058.640,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp.330.750.000,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Program Informasi Dan Komunikasi Publik memiliki pagu sebesar Rp. 6.748.839.321,- dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:
- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.6.748.839.321,-
 - Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Penyusunan Konten
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
- 3) Program Aplikasi Informatika memiliki pagu sebesar Rp.508.423.000,- dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.,-
 - Sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.508.423.000,-
 - Sub kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
 - Sub kegiatan Koordinasi penyusunan proses bisnis
 - Sub kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
 - Sub kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
 - Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki pagu sebesar Rp.218.542.000,- dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.218.542.000,-
 - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor
 - Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektor terhadap Sistem Statistik Nasional
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektor Sesuai Standar
- 5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi memiliki pagu sebesar Rp.109.542.000,- dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:
- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.109.542.000,-
 - Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.,-
 - Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Indragiri Hilir

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK				14.616.793.913,00				17.375.033.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.616.793.913,00				17.375.033.000,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.288.709.913,00				16.663.930.000,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	7.031.447.592,00			100 %	5.820.260.000,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 Persen	100 Persen	86.302.020,00			100 Persen	69.335.000,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	69.810.820,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	39.620.000,00	DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	11.028.070,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Laporan	19.810.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	5.463.130,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	9.905.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar	100 Persen	100 Persen	3.770.594.593,00			100 Persen	4.668.688.000,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.762.594.593,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30 Orang/bulan	4.665.363.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	355.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	2.970.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset dan barang milik daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	0,00			100 Persen	7.526.000,00	
	2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	7.526.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi dan aparatur yang berkinerja baik	100 Persen	100 Persen	13.900.000,00			100Persen	29.715.000,00	
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30 Paket	9.905.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	2 Orang	13.900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Orang	19.810.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	1.153.842.339,00			100 Persen	291.211.000,00	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.999.965,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	3.961.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	295.842.534,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Paket	99.052.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.979.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	9.905.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	52.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Paket	29.715.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	13.489.340,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	19.810.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 Dokumen	250 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	250 Dokumen	9.905.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	12 Laporan	777.031.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	75 Laporan	118.863.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	0,00			100 Persen	316.966.000,00	
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Unit	178.294.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Unit	99.052.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	39.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	100 Persen	100 Persen	1.676.058.640,00			100 Persen	357.579.000,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	989.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	59.431.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.433.558.640,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	297.159.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	100 Persen	330.750.000,00			100 Persen	79.240.000,00	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3 Unit	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Unit	9.905.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	42.560.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Unit	19.810.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	6 Unit	269.180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	39.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	29 Unit	19.010.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Unit	9.905.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	100 %	100 %	6.748.839.321,00			100 %	2.832.911.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan	100 Persen	100 Persen	6.748.839.321,00			100 Persen	2.832.911.000,00	
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		7 Komunitas	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		59.431.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		40 Permohonan	179.839.321,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		59.431.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		70 Media	6.519.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.377.272.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten									
						Jumlah Konten Informasi Publik		3 Konten	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		198.105.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		6 Orang	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		138.672.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi Berbasis TIK Persentase Jumlah Aplikasi Pd Yang Jaringan Aplikasinya Di Awasi Oleh Dinas Kominfo Pers Kab.Inhil	100% 100%	75 % 92 %	508.423.000,00			100% 100%	8.010.759.000,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang dikelola	100 Persen	100 Persen	0,00			100 Persen	475.452.000,00	
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		1 Dokumen	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		475.452.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	90Persen	90 Persen	508.423.000,00			90 Persen	7.535.307.000,00	
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional									
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		1 Aplikasi	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.535.307.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis									
							Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo		1 Dokumen	23.620.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda									
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		1 Laporan	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		1 Dokumen	17.235.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi									
							Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah		1 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah									
							Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan		1 Dokumen	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE									
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		1 Dokumen	73.990.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		1 Aplikasi	17.120.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
	2	16	03	2.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah									
						Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah		1 Dokumen	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									
						Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas		32 unit	81.496.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
						Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra		34 Perangkat Daerah	78.842.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
							Pemerintah Daerah Kab/Kota								
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi									
						Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		1 Layanan	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE									
						Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		34 Perangkat Daerah	192.120.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				218.542.000,00				362.440.000,00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	218.542.000,00			100 %	362.440.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100 Persen	100 Persen	218.542.000,00			100 Persen	362.440.000,00	
	2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		50 Orang	61.676.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		29.715.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional									
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		100 Persentas e	70.736.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		198.105.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral									
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		100 Persentas e	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		1 Dokumen	86.130.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		39.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		1 Dokumen	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				109.542.000,00				348.663.000,00	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah	74 %	74 %	109.542.000,00			74 %	348.663.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian	100 Persen	100 Persen	109.542.000,00			100 Persen	328.853.000,00	
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	11.886.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	6 Laporan	38.242.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Laporan	19.810.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	68.620.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	198.105.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	35 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	2.680.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Perangkat Daerah	99.052.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perangkat pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	0,00			100 Persen	19.810.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16	17	
							yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi									
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	34 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Perangkat Daerah	19.810.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	J U M L A H									14.616.793.913,00				17.375.033.000,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 disertai indikator kinerja, target capaian kinerja dan pagu indikatifnya. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tertuang pada tabel berikut:

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7
						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK			14.616.793.913,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.616.793.913,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			14.288.709.913,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 %	7.031.447.592,00
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100 Persen	86.302.020,00
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Dokumen	69.810.820,00	
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	4 Laporan	11.028.070,00	
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Laporan	5.463.130,00
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar		100 Persen	3.770.594.593,00
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	30 Orang/bulan	3.762.594.593,00
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	0,00
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	8.000.000,00
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset dan barang milik daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara		100 Persen	0,00
	2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	0,00
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi dan aparatur yang berkinerja baik		100 Persen	13.900.000,00
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Paket	0,00
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Orang	13.900.000,00
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik		100 Persen	1.153.842.339,00
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Paket	4.999.965,00
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Paket	295.842.534,00
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Paket	4.979.500,00
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Paket	52.500.000,00
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Paket	13.489.340,00
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	250 Dokumen	5.000.000,00
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	12 Laporan	777.031.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah		100 Persen	0,00
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Unit	0,00
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Unit	0,00
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Unit	0,00
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor		100 Persen	1.676.058.640,00
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	2.500.000,00
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	240.000.000,00
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	1.433.558.640,00
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik		100 Persen	330.750.000,00
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Unit	0,00
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Unit	42.560.000,00
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	6 Unit	269.180.000,00
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	29 Unit	19.010.000,00
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi		100 %	6.748.839.321,00
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan		100 Persen	6.748.839.321,00
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	7 Komunitas	0,00
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik				
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	40 Permohonan	179.839.321,00
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	70 Media	6.519.000.000,00
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten				
							Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Konten	50.000.000,00
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	6 Orang	0,00
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi Berbasis TIK Persentase Jumlah Aplikasi Pd Yang Jaringan Aplikasinya Di Awasi Oleh Dinas Kominfo Pers Kab.Inhil		75 % 92 %	508.423.000,00
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang dikelola		100 Persen	0,00
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	0,00
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi		90 Persen	508.423.000,00
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Aplikasi	0,00
	2	16	03	2.02	0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis				
							Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	23.620.000,00
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00
	2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				
							Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	17.235.000,00
	2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				
							Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	24.000.000,00
	2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah				
							Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	0,00
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	73.990.000,00
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Aplikasi	17.120.000,00
	2	16	03	2.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	0,00
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	32 unit	81.496.000,00
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	34 Perangkat Daerah	78.842.000,00
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				
							Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Layanan	0,00
	2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE				
							Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	34 Perangkat Daerah	192.120.000,00
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				218.542.000,00
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu		100 %	218.542.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia		100 Persen	218.542.000,00
	2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	50 Orang	61.676.000,00
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional				
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persentase	70.736.000,00
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral				
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persentase	0,00
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia				
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	86.130.000,00
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	0,00
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				109.542.000,00
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah		74 %	109.542.000,00
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian		100 Persen	109.542.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	0,00	
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
						Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	6 Laporan	38.242.000,00	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	68.620.000,00	
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	15 Perangkat Daerah	2.680.000,00	
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perangkat pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi	100 Persen	0,00	
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	13 Perangkat Daerah	0,00	
J U M L A H								14.616.793.913,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang dibuat dengan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 yang dijadikan prioritas dan indikasi perumusan atau penyusunan kegiatan program Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Government*

sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil benar-benar di kedepankan.

Penyusunan Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Pada Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah dijabarkan beberapa isu-isu penting atau strategis perihal penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, oleh karenanya diharapkan rencana yang telah disusun atau dirumuskan ini dapat mengatasi atau mengurangi kendala-kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya, dan dengan spirit perubahan kearah yang lebih baik, pada akhirnya apa yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian

dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dapat segera terealisasi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir ini dibuat, untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada Tahun 2025.

Tembilahan, Juli 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Dr. TRIO BENI PUTRA, SE, MM
NIP.19751126 199802 1 001